



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2018-2023



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

JALAN RASAKUNDA – PANGKALPINANG TELP./FAX. (0717) - 437755

Website: <http://www.bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id> Email : info@bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas karunia rahmat, ridho dan anugerahnya, akhirnya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Dilakukannya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.

Melalui Dokumen Perubahan Renstra BKPSDMD ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2018-2023. Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun dan nantinya akan menjadi tolak ukur kinerja bagi keberhasilan BKPSDMD pada periode tersebut.

Dengan tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023, semoga tujuan, sasaran, dan target kinerja Tahun 2018-2023 dapat dicapai.

Pangkalpinang,

2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,



FAHRIZAL, ST
Pembina, IV/a
NIP. 198502062008041001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDMD.....	9
2.2 Sumber Daya BKPSDMD.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	33
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	34
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	34
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3 Telaah Renstra KL dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	37
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	44
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	44
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	47
5.1 Strategi	47
5.2 Arah Kebijakan	47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	50
BAB VIII PENUTUP.....	52
8.1 Pedoman Transisi	52
8.2 Kaidah Pelaksanaan	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai di Lingkungan BKPSDMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	24
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai di Lingkungan BKPSDMD Berdasarkan Golongan	25
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi pada BKPSDMD	26
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDMD	29
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada BKPSDMD.....	30
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BKPSDMD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	36
Tabel 3.3 Permasalahan BKPSDMD Kota Pangkalpinang Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Program	40
Tabel 3.4 Permasalahan BKPSDMD Kota Pangkalpinang Berdasarkan Sasaran Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Program	42
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDMD Kota Pangkalpinang	46
Tabel 7.1 Indikator Kinerja BKPSDMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi dan prakarsa sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Saat ini masyarakat menuntut adanya pelayanan prima atas kinerja Pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya.

Peningkatan pelayanan prima tidak terlepas dari pembangunan Aparatur Negara itu sendiri sebagai pelaksana. Pembangunan Aparatur Negara sangat penting dan menentukan dikarenakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan banyak bergantung pada seberapa besar kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur Negara. Pembangunan Aparatur Negara mencakup aspek luas, dimulai dari peningkatan fungsi utama, kelembagaan yang efektif dan efisien dengan tata laksana yang jelas dan transparan, serta Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional dan akuntabel. Sedangkan pendayagunaan aparatur merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Upaya reformasi aparatur salah satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian.

Upaya pembangunan kepegawaian dilaksanakan antara lain dengan penyempurnaan manajemen bidang kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, serta pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Memasuki tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kota Pangkalpinang, karena adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Kota Pangkalpinang sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, adalah adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya hal lain yang mendasari perubahan RPJMD adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) / Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020

Berdasarkan hal tersebut sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan berpedoman pada RPJMD. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi oleh tim pemutakhiran klasifikasi kodifikasi dan nomenklatur sesuai dengan pemetaan untuk selanjutnya ditambahkan dalam database system informasi pemerintahan daerah. Pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Yang dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi pada tahun 2020 telah ditetapkan dengan keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai keterkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, dimana sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini sangat selaras dengan salah satu sasaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu terwujudnya ASN yang kompeten.

Begitu juga dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memiliki peran sangat strategis didalam pengelolaan manajemen ASN yang dituangkan dalam sasaran strategis BKN 2020-2024 yaitu meningkatnya tingkat profesionalisme pegawai ASN. Sejalan dengan hal tersebut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusung hal yang sama yaitu mewujudkan ASN yang kompeten yang bermuara pada peningkatan disiplin dan profesionalisme ASN.

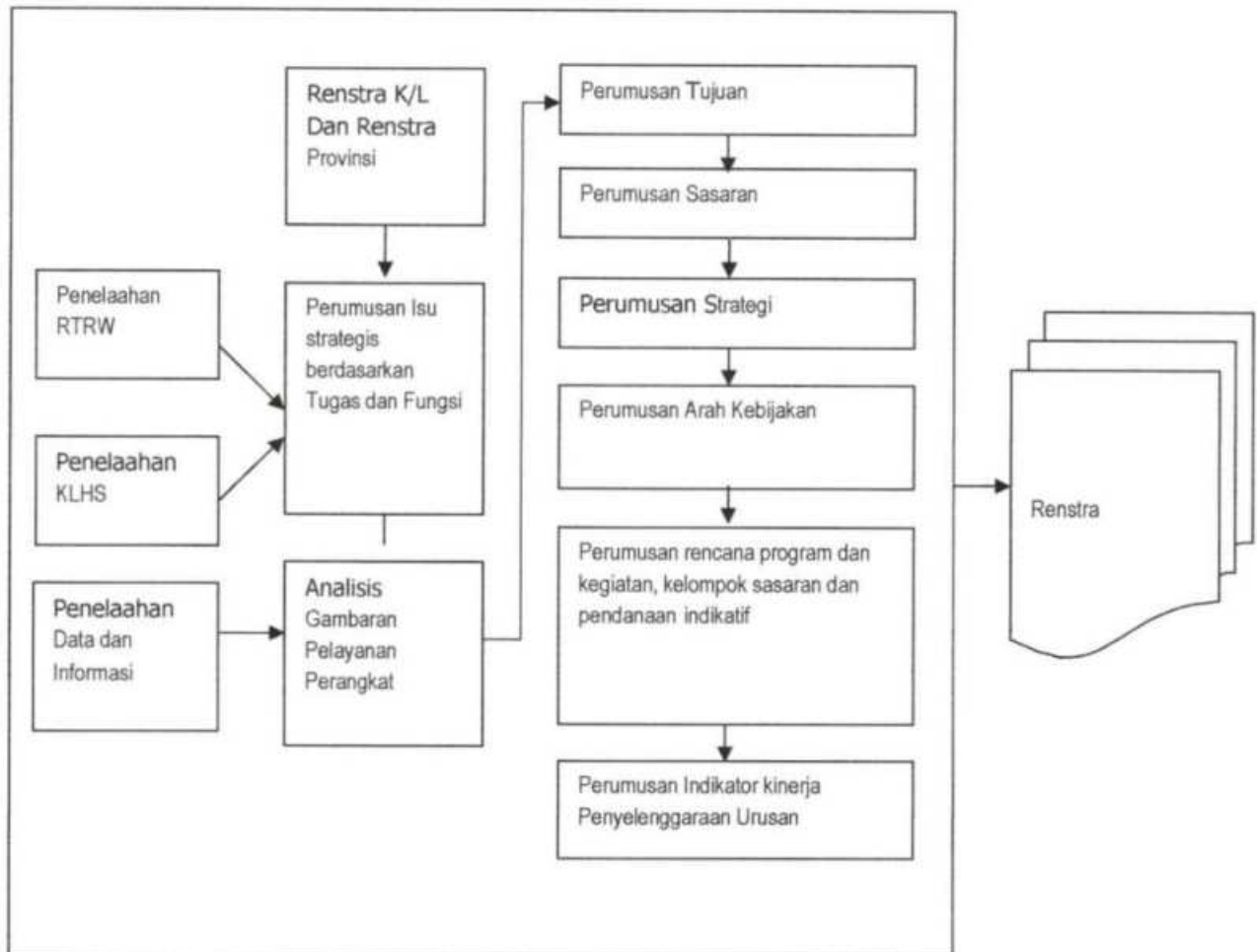
Sejalan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang menyusun Perubahan Rencana Strategis dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang berpedoman juga kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang. Keselarasan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah dengan Misi Kepala Daerah terpilih terkait dalam misi yaitu **“Menang Sumber Daya”** yang nantinya akan bermuara pada peningkatan kualitas disiplin dan profesionalisme ASN.

Selanjutnya Rencana Kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen melalui penjabaran kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 2018-2023.

Selain itu Perubahan Renstra BKPSDMD menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada BKPSDMD, baik evaluasi Perubahan Renstra maupun evaluasi Renja. Diagram Alur Tahapan Penyusunan Perubahan Renstra Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Perubahan Renstra



1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang 2013-2018 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang 2018-2023 (Lembaran Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);
32. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);
33. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah untuk memberikan gambaran arah yang jelas tentang rencana kinerja, kegiatan dan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan kepegawaian selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.
- 2) Sebagai tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan didalam mengambil kebijakan terkait dengan manajemen kepegawaian tahun 2018-2023 berdasarkan pertimbangan yang logis terhadap berbagai isu strategis, permasalahan yang telah terjadi di masa lalu dan kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKPSDMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDMD

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah BKPSDMD

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas BKPSDMD tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja BKPSDMD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra BKPSDMD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPSDMD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang kepegawaian merupakan lembaga teknis yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan manajemen kepegawaian di daerah khususnya di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok **“Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan”**, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

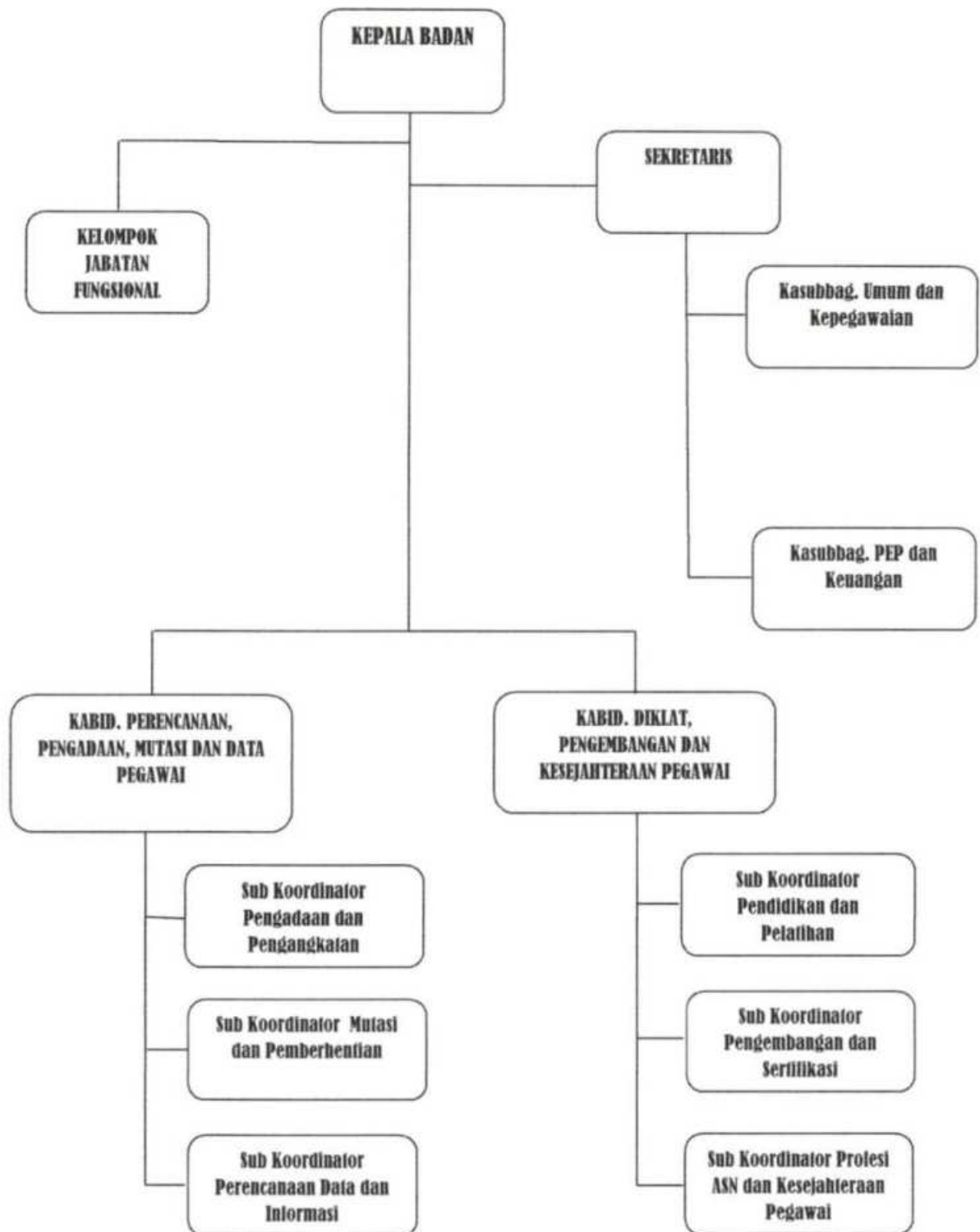
1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
2. Penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
4. Penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
6. Pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
8. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi 2 sub bagian yaitu :
 - a. Sub.bagian umum dan kepegawaian
 - b. Sub.bagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan
3. Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data, membawahi 3 Sub koordinator yaitu :
 - a. Sub koordinator pengadaan dan pengangkatan
 - b. Sub koordinator mutasi dan pemberhentian
 - c. Sub koordinator perencanaan data dan informasi
4. Bidang Diklat dan Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi 3 Sub koordinator, yaitu:
 - a. Sub koordinator pendidikan dan pelatihan
 - b. Sub koordinator pengembangan dan sertifikasi
 - c. Sub koordinator profesi ASN dan kesejahteraan pegawai

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

Gambar 1.1



Tupoksi BKPSDMD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - b. penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - d. penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - f. pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - g. pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah membawahi :

1. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
 - d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah; penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; pemutakhiran informasi dan dokumentasi; penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Daerah Kota Pangkajene.

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP, LPPD LKPJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
 - d. pelaksanaan analisis keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - e. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - f. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

2. Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai

- (1) Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.
- (2) Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.
- (3) Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi:

1. Sub Koordinator Pendidikan dan Latihan;
 2. Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi; dan
 3. Sub Koordinator Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai.
1. Sub Koordinator Pendidikan dan Latihan
 - (1) Sub Koordinator Pendidikan dan Latihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendidikan dan Latihan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - (2) Kepala Sub Koordinator Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pendidikan dan Latihan.
 - (3) Kepala Sub Koordinator Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pendidikan dan Latihan
 - b. pelaksanaan analisa kebutuhan diklat;
 - c. penyusunan rencana teknis pengembangan sistem diklat, kurikulum, silabi, modul dan metode pembelajaran diklat;
 - d. penyusunan rencana jadwal diklat, calon peserta diklat dan widyaiswara; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pendidikan dan Latihan.
 2. Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
 - (1) Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendidikan dan Latihan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - (2) Kepala Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pendidikan dan Latihan.
 - (3) Kepala Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pengembangan dan Sertifikasi;
 - b. pendataan penyusunan riwayat pegawai/*track record* pegawai;
 - c. penyusunan rencana dan pengkajian pengembangan karier pegawai dan profesionalisme pegawai;

- d. penyelenggaraan peningkatan dan pembinaan karier pegawai;
 - e. pelaksanaan keikutsertaan dan kebutuhan diklat pegawai dalam rangka pengembangan karier pegawai dan profesionalisme pegawai; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengembangan dan Sertifikasi.
3. Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
- (1) Sub Koordinator Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - (2) Kepala Sub Koordinator Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai.
 - (3) Kepala Sub Koordinator Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai;
 - b. pendataan, peningkatan, pengusulan dan pengembangan kesejahteraan pegawai;
 - c. pemberian tanda jasa;
 - d. pembekalan, pembinaan dan pengembangan fisik serta mental pegawai; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai.

3. Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data

- (1) Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

- (3) Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data mempunyai fungsi:
- penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;
 - penyusunan petunjuk teknis lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;
 - penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perbendaharaan lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;
 - pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data; dan
 - pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

- Sub koordinator Pengadaan dan Pengangkatan;
 - Sub koordinator Mutasi dan Pemberhentian; dan
 - Sub koordinator Perencanaan, Data dan Informasi.
1. Sub koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
- (1) Sub koordinator Pengadaan dan Pengangkatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengadaan dan Pengangkatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data.
 - (2) Kepala Sub koordinator Pengadaan dan Pengangkatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengadaan dan Pengangkatan.
 - (3) Kepala Sub koordinator Pengadaan dan Pengangkatan mempunyai fungsi:
 - pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pengadaan dan Pengangkatan
 - pelaksanaan pengadaan ASN tingkat kota;
 - pengusulan pengadaan NIP;
 - penyusunan bahan penetapan kebijakan pengangkatan CASND tingkat kota;
 - pelaksanaan pengangkatan CASND tingkat kota;

- f. penyusunan bahan penetapan CASND menjadi ASND tingkat kota;
 - g. penetapan kenaikan pangkat ASND kota menjadi golongan ruang I/b sampai dengan III/d;
 - h. pengusulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian;
 - i. penyusunan bahan penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASND kota dalam dan dari Jabatan Tinggi Pratama atau Jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kota;
 - j. pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kota;
 - k. pengusulan konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - l. penyelesaian administrasi pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat pegawai; dan
 - m. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengadaan dan Pengangkatan.
2. Sub koordinator Mutasi dan Pemberhentian
- (1) Sub koordinator Mutasi dan Pemberhentian dipimpin oleh seorang Kepala Sub koordinator Mutasi dan Pemberhentian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data.
 - (2) Kepala Sub koordinator Mutasi dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Mutasi dan Pemberhentian.
 - (3) Kepala Sub koordinator Mutasi dan Pemberhentian mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Mutasi dan Pemberhentian
 - b. penyusunan bahan penetapan perpindahan ASND kota;
 - c. penyusunan bahan penetapan pemberhentian ASND kota golongan ruang III/d kebawah dan pemberhentian sebagai CASND kota;
 - d. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian skala kota;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN dilingkungan kota;
 - f. penyelenggaraan Mutasi dan Pembinaan pangkat, Mutasi dan Pembinaan jabatan, Mutasi dan Pembinaan antar daerah;

- g. penyusunan rencana mutasi, rotasi pegawai, pengadaan administrasi status hukum kepegawaian;
 - h. supervisi terkait disiplin pegawai dan pemberhentian pegawai;
 - i. pengelolaan kenaikan gaji berkala;
 - j. pemberian pensiun bagi PNS; dan
 - k. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Mutasi dan Pemberhentian.
3. Sub koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
- (1) Sub koordinator Perencanaan, Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan, Data dan Informasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data.
 - (2) Kepala Sub koordinator Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perencanaan, Data dan Informasi.
 - (3) Kepala Sub koordinator Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Perencanaan, Data dan Informasi;
 - b. pendataan pegawai;
 - c. pemetaan kuantitas dan kualitas pegawai pada setiap satuan organisasi perangkat daerah;
 - d. perencanaan kebutuhan pegawai dan rencana pendistribusian pegawai;
 - e. penyusunan formasi ASND setiap tahun anggaran;
 - f. penyusunan bahan penetapan formasi ASND setiap tahun anggaran;
 - g. pengusulan formasi ASND setiap tahun anggaran;
 - h. pengumpulan dan penyimpanan data dan arsip pegawai;
 - i. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG);
 - j. penyelenggaraan penyajian dan layanan data dan informasi kepegawaian; dan
 - k. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perencanaan, Data dan Informasi.

2.2 Sumber Daya BKPSDMD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 didukung oleh ASN sebanyak 28 orang. Adapun komposisi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai di Lingkungan BKPSDMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Sesuai Bidang Penugasan	Pegawai		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
ASN				
1.	SMA	4	1	5
2.	D3	3	5	8
4.	S1	8	6	14
5.	S2	0	1	1
6.	S3	-	-	-
	Jumlah	15	13	28
NON ASN				
1.	SMA	3	2	5
2.	S1	2	8	10
3.	SD	1	0	1
		6	10	16

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDMD Kota Pangkalpinang (Desember 2022).

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai di Lingkungan BKPSDMD Berdasarkan Golongan

No.	Sesuai Bidang Penugasan	Pegawai		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
Aparatur Sipil Negara				
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	-	-	-
2.	Pembina Tingkat I, IV/b	-	-	-
3.	Pembina, IV/a	1	1	2
4.	Penata Tingkat I, III/d	5	3	8
5.	Penata, III/c	-	1	1
6.	Penata Muda Tingkat I, III/b	0	3	3
7.	Penata Muda, III/a	3	4	7
8.	Pengatur Tingkat I, II/d	5	-	5
9.	Pengatur, II/c	1	1	2
10.	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	-	-	-
11.	Pengatur Muda, II/a	-	-	-
	Jumlah	15	13	28

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDMD Kota Pangkalpinang (Desember 2022).

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang			
No	Sarana/ Prasarana	Jumlah Tahun 2022	Kondisi (Baik/ Rusak)
1	2	3	4
1	Gedung	1	Baik
2	Kendaraan Dinas		
	- Roda 4	5	Baik
	- Roda 2	6	Baik
3	Termometer standar	1	
4	Mesin ketik manual portable(11-13)	2	Baik
5	Lemari Besi	3	Baik
6	Rak Besi/Metal	12	Baik
7	Filling Besi/Metal	15	Baik
8	Brand Kas	1	Baik
9	Rotary Filling	3	Baik
10	Lemari Sorok	2	Baik
11	Lemari Kaca	1	Baik
12	Lemari Makan	1	Baik
13	Lemari kayu	2	Rusak Berat
14	Alat Penghancur Kertas	5	Baik
15	Papan Nama Instansi	1	Baik
16	Papan Pengumuman	1	Baik
17	Papan Absen	2	Baik
18	CCTV	1	Baik
19	Copy Board/Elektrik White Board	2	Baik
20	Mesin Absensi	1	Rusak Berat
21	Panel Pameran	1	Baik
22	Papan Nama Ruangan/Jabatan	1	Baik
23	Meja Kayu/Rotan	6	Baik
24	Meja Rapat	2	Baik
25	Meja Reseption	1	Baik
26	Kursi Rapat	35	Baik
27	Kursi Tamu	1	Baik
28	Kursi Putar	11	8 Baik, 2 Kurang Baik 1 Rusak Berat
29	Meja Biro	4	Baik
30	Sofa	1	Baik
31	Kursi Kerja	12	11 Baik 1 Rusak Berat
32	Rak TV	1	Baik
33	Karpet	3	Baik
34	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	Baik
35	Lemari Es	1	Rusak Berat
36	Personal computer lainnya	8	Baik,
37	AC Unit	15	11 Baik, 1 kurang Baik, 3 Rusak Berat
38	Dispenser	9	7 Baik, 2 Rusak Berat

39	tempat tidur	1	Baik
40	Televisi	4	3 Baik, 1 Rusak Berat
41	Sound System	1	Baik
42	Timbangan Badan	1	Baik
43	Tangga Alumunium	1	Baik
44	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	Baik
45	Alat Pemadam Portable	2	Baik
46	P.C Unit/ Komputer PC	26	25 Baik, 1 Rusak, Berat
47	Lap Top	9	8 Baik, 1 Rusak Berat
48	Note Book	1	Baik
49	Scanner	8	Baik
50	Printer	22	Baik
51	UPS	2	Baik
52	Harddisk Eksternal	3	Baik
53	Server	1	Baik
54	Router	1	Rusak Berat
55	Switch Hub	4	3 Baik, 1 Rusak Berat
56	Meja Kerja	27	26 Baik, 1 Kurang Baik
57	Conector	4	3 Baik, 1 Kurang Baik
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
59	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	Baik
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
61	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	Baik
62	Proyektor + Attachment	1	Baik
63	Camera Electronic	1	Baik
64	Handy Talky	2	Baik
65	Facsimile	1	Baik
66	Wireless Amplifier	2	Baik
67	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Baik
68	Penambahan daya listrik	1	Baik
69	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	1	Baik
70	Jaringan telepon di atas tanah kapasitas sedang	1	Baik
71	Alat ukur lainnya/Thermo	1	Baik
72	Web Cam	4	Baik
73	Mesin Cetak ID Card pegawai	1	Baik
74	Jaringan Pembawa Lain-lain	1	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai lembaga teknis yang mengelola manajemen kepegawaian telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan BKPSDMD.
2. Penyelenggaraan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pensiun, mutasi, tugas belajar/ izin belajar pegawai.
3. Pelaksanaan pembinaan, disiplin dan kesejahteraan kepegawaian.
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepegawaian.
5. Pengelolaan dan penyiapan data, informasi dan arsip kepegawaian.

Kelompok sasaran yang akan diberikan pelayanan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah aparatur pemerintah, dengan memfasilitasi semua urusan kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang.

Pencapaian target berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana APBD Kota Pangkalpinang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang(Tahun 2016 – 2020)

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja																		SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																				
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	-	0.27	0.05	20.00	0.35	0.57	163.64	0.17	0.13	76.47	0.64	0.16	25	2.6	1.47	56.54	2.6	1.47	56.54	
2.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	49.12	55.78	54.15	97.07	54.15	54.15	100	56.87	54.69	96.17	55.37	52.72	95.21	61.50	35.68	58.02	61.50	35.68	58.02	
3.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	27	29	29	100	29	28	100	29	28	96.55	29	21	72.41	32	23	71.88	32	23	71.88	
4.	jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	124	136	125	91.91	118	117	100	116	108	93.10	116	113	97.41	116	113	97.41	116	113	97.41	
5.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2104	2032	2032	2032	1593	1593	100	1553	1558	100	1735	1731	99.76	1.728	1.728	100	1.728	1.728	100	

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2016 - 2020

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	766,212,190	704,729,000	633,307,914	705,709,150	334,623,141	705,727,515	656,018,846	580,191,027	619,272,089	326,693,662	92,11	93,09	91,61	87,75	97,63	628,916,279	577,580,628
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	180,051,535	169,400,000	237,919,000	186,810,000	140,289,000	143,403,757	116,541,736	206,880,153	168,045,264	136,527,798	79,65	68,80	86,95	89,96	97,32	182,893,907	154,279,742
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	-	20,780,000	28,500,000	-	-	-	20,310,000	27,900,000	-	-	-	97,83	97,89	-	20,535,000	28,200,000
4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	165,000,000	369,240,000	135,000,000	188,057,000	28,850,000	91,929,100	331,399,517	93,567,008	154,531,171	27,961,000	55,71	89,75	69,31	82,17	97,60	177,189,400	139,877,559
5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15,300,000	6,000,000	8,000,000	18,000,000	22,730,000	15,300,000	6,000,000	8,000,000	16,604,000	22,500,000	100	100	100	92,24	98,99	14,006,000	13,680,800
6. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	1,163,000,000	-	148,880,000	180,000,000	-	1,125,798,150	-	148,800,075	175,671,100	-	96,80	-	99,45	97,60	-	487,293,333	483,423,108
7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KORPRI	-	45,440,000	40,875,000	300,000,000	-	-	43,674,000	37,223,500	283,471,200	-	-	96,11	91,07	94,49	-	128,771,667	121,456,233
8. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (TEKNIS)	602,785,000	305,000,000	392,240,286	2,775,471,000	-	578,854,550	175,763,704	66,187,286	2,385,240,626	-	96,03	57,63	16,87	85,94	-	1,018,874,072	801,511,542
9. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	1,562,351,000	1,443,720,000	1,731,116,900	1,999,525,000	-	1,234,479,427	1,341,194,952	1,209,780,322	1,623,337,031	-	79,01	92,90	69,88	81,19	-	1,684,178,225	1,352,197,936
10. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				-	1,841,982,453					1,661,765,602				90,22			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1. Tantangan

Tantangan (*threats*) yang dihadapi dalam pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu penting yang karena secara otomatis mengubah manajemen birokrasi di pemerintah. Terbitnya PP 11/2017, pola pembinaan manajemen PNS mengalami transformasi sesuai dengan tuntutan UU ASN. Di mana pembinaan PNS mulai dari sistem rekrutmen hingga pengangkatan dalam jabatan, menekankan tiga aspek mutlak yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja,
2. Keberagaman kompetensi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
3. Tuntutan akan kualitas layanan aparatur.
4. Tuntutan Masyarakat terhadap pelayanan dan profesionalitas ASN
5. Kesadaran ASN terhadap pengembangan diri yang masih minim
6. Jumlah dan kualitas, komposisi dan distribusi PNS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi/peran setiap satuan organisasi dan beban kerja riil organisasi belum optimal

2.4.2. Peluang

Peluang (*opportunity*) yang dihadapi dalam pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Adanya kesempatan untuk pengembangan kompetensi pegawai.
2. Adanya perkembangan IPTEK yang pesat, dukungan serta peran serta masyarakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja pada era globalisasi
3. Adanya kewenangan dalam manajemen dibidang kepegawaian.

2.4.3. Kekuatan

Sedangkan kekuatan (*strenght*) yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Komitmen pimpinan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Tersedia sarana dan prasarana baik fisik maupun personil untuk penilaian kinerja ASN (assessment center)
3. SDM Pengelola Kepegawaian yang berkompeten
4. Pengembangan/dukungan sistem informasi yang terus dilakukan

2.4.4. Kelemahan

Sedangkan kelemahan (*weakness*) yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Database kepegawaian belum sepenuhnya akurat
2. Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu
3. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa Perangkat Daerah
4. Penetapan dalam jabatan belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

Secara umum permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain sebagai berikut :

1. Distribusi ASN juga menjadi isu penting seperti permasalahan kesenjangan jumlah, kualitas, ketidaksinkronan antara kompetensi ASN dan promosi terbuka hanya terbatas pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan kebutuhan pembangunan di instansinya harus segera dipecahkan agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik.
2. Terbatasnya pelaksanaan pendidikan pelatihan formal kepada seluruh pegawai, sehingga kurangnya kesempatan untuk peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.
3. Kedisiplinan dan profesionalitas capaian kinerja ASN belum berjalan dengan baik dengan melihat Masih adanya kasus pelanggaran disiplin dan kode etik

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

**“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”
(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)**

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang **Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur.**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang, untuk tahun 2018-2023 mendukung Visi Kepala Daerah terpilih yakni **Frase Visi ke 3 : “Mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai Kota “UNGGUL”**. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian *Frase Visi ke 3 yaitu : “Mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai Kota Unggul”*. Adapun Misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah **Misi ke 3 yaitu: “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Menuju Tercapainya Good Governance” dengan Indikator Tujuan : “Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah” dan dengan Indikator Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).**

Faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BKPSDMD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan menuju Tercapainya Good Governance Tujuan : Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Tingginya gap kompetensi ASN	Ketidaksesuaian pendidikan, pelatihan, dan pengalaman terhadap jabatan Promosi terbuka hanya terbatas pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Adanya sub kegiatan pengelolaan promosi ASN
		Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai	Belum dilakukannya pengembangan berbasis kompetensi dan pendidikan pelatihan kepada seluruh pegawai Keterbatasan anggaran	Adanya kesempatan untuk peningkatan kompetensi sumber daya aparatur (melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi)
		Masih rendahnya kinerja pegawai	Absensi belum terintegrasi, pembayaran tunjangan kinerja belum didasarkan pada kinerja pegawai	Adanya komitmen dari para pimpinan

3.3. Telaah Renstra KL dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra KL

Permasalahan pelayanan BKPSDM Kota Pangkalpinang akan dilihat berdasarkan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi, Renstra Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara RI dan Renstra Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Renstra Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi

- 1) Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten
 - a. Pengisian jabatan sesuai kompetensi jabatan

Dalam rangka mewujudkan PNS yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab, diperlukan PNS yang kompeten melalui sistem pengisian jabatan yang profesional dan terbuka. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki aparatur dengan syarat kompetensi suatu jabatan. Pengisian jabatan sesuai kompetensi jabatan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Pengembangan kompetensi

Dalam pengembangan kompetensi, ASN mempunyai hak untuk diklat minimal 20 jam dalam 1 tahun. Pengembangan kompetensi ASN minimal 20 jam dalam 1 tahun belum sepenuhnya dilaksanakan kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2) Terwujudnya SDM Aparatur yang kompetitif
 - a. Instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan promosi terbuka;

Salah satu langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur adalah melalui perubahan sistem atau mekanisme rekrutment yang berbasis pada kompetisi. Yang menarik dari perubahan mekanisme ini adalah adanya promosi terbuka (*open promotion*) yang oleh masyarakat umum lebih dikenal sebagai lelang jabatan (*job bidding*) atau *fit and proper test*. Promosi Terbuka sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meskipun terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama.

- b. Jumlah instansi pemerintah yang telah menerapkan standar kinerja individu Mulai 1 Januari 2014 penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan parameter berupa hasil kerja yang nyata dan terukur, sehingga subjektivitas penilaian dapat diminimalisir sebagaimana konsekuensi diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Penilaian prestasi kerja merupakan rangkaian proses manajemen kinerja, berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolak ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Penilaian prestasi kerja telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun capaian tersebut belum dijadikan dasar pembayaran tunjangan.

Renstra Badan Kepegawaian Negara

Sebagaimana dicantumkan dalam RPJMN, juga dinyatakan sasaran bidang aparatur yang berkaitan dan menjadi tanggung jawab BKN adalah terkait dengan pencapaian indeks Profesionalitas ASN. Pencapaian strategis yang bersifat impact (sasaran ultimate), berikut ini sasaran intermediate yang akan dicapai dalam Program BKN yang dapat berfungsi dan memiliki manfaat terhadap capaian sasaran strategis. Sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi BKN adalah:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN;
2. Keandalan sistem informasi ASN;
3. Meningkatnya disiplin pegawai;
4. Meningkatnya profesionalisme ASN;
5. Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan berbasis manajemen mutu;
6. Meningkatnya pelayanan pembinaan PNS;
7. Terwujudnya BKN yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Badan Kepegawaian Negara menitikberatkan sasaran strategis pada meningkatnya tingkat profesionalisme pegawai ASN. Profesional dalam pendekatan *merit base* mengandung persyaratan sebagai berikut:

1. Kompetensi
Kesesuaian antara syarat jabatan dengan kompetensi (Pendidikan, Pelatihan, Keahlian dan Pengalaman)

Sebuah organisasi modern harus memenuhi syarat bahwa yang menduduki suatu jabatan harus memiliki pengetahuan, keterampilan yang memadai sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Ketidaksesuaian antara syarat jabatan dengan seseorang yang sedang menjabat akan disebut kompetensi gap. Sebaliknya semakin kecil gap menunjukkan semakin profesional sebuah lembaga tersebut. Kesesuaian antara syarat jabatan dengan kompetensi belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Kinerja

Seorang pejabat harus memiliki kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain kuantitas, kualitas dan ketetapan waktu menyelesaikan pekerjaan juga menjadi dasar perhitungan kinerja. Perhitungan kinerja dapat dibedakan pada posisi pelayanan kepada *beneficiaries*. Penghitungan kinerja masih menggunakan penilaian prestasi kerja pegawai terhadap SKP yang telah disusun. Pemberian tunjangan berdasarkan capaian kinerja belum dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Kompensasi

Kompensasi merupakan satu persyaratan dalam mengukur tingkat profesionalisme suatu lembaga. Kondisi kompensasi yang belum sesuai akan mendorong terjadinya upaya-upaya legal maupun ilegal untuk menyesuaikan pendapatan seorang pegawai. Pegawai akan sibuk untuk memenuhi kebutuhannya dibanding memikirkan pelayanan yang harus diberikan. Setiap jenis pekerjaan akan memiliki tingkat kompensasi yang berbeda-beda tergantung resiko dan wilayah dia bekerja. Pemberian Kompensasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdasarkan capaian kinerja.

4. Disiplin

Faktor keempat yang menjadi instrumen indikator adalah disiplin. Tingkat kedisiplinan merupakan upaya pengendalian yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat pemberian hukuman jika ditemukan individu yang melanggar disiplin. Kasus pelanggaran disiplin masih ada pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Telaah Renstra Lembaga Administrasi Negara RI

Sasaran Lembaga Administrasi Negara RI Menjadi institusi pembelajar berkelas dunia melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan dan Inovasi Administrasi

Negara dalam mewujudkan *World Class Government*. BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara terkait dengan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah melaksanakan diklat peningkatan kompetensi meskipun belum merata ke seluruh pegawai.

Tabel 3.3
Permasalahan BKPSDMD Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/ Lembaga
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan BKPSDM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten (Kemenpan Rb); - Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme aparatur (LAN RI); - Meningkatnya profesionalisme pegawai ASN (BKN)	Tingginya gap Kompetensi ASN	- Ketidaksesuaian pendidikan, pelatihan, dan pengalaman terhadap jabatan - Belum dilakukannya pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai	- Rencana pemetaan/ redistribusi pegawai; - ASN wajib memiliki kompetensi sesuai undang-undang ASN - ASN mempunyai hak mengikuti pelatihan 20 jam /tahun
	Meningkatnya profesionalisme pegawai ASN (BKN)	Masih rendahnya kinerja ASN	- Capaian kinerja belum dijadikan dasar pembayaran tunjangan kinerja	Rencana absensi terintegrasi (kehadiran, kompensasi, dan kinerja)
	Meningkatnya profesionalisme pegawai ASN (BKN)	Masih rendahnya disiplin ASN	Masih adanya kasus pelanggaran disiplin dan kode etik	Rencana absensi terintegrasi (kehadiran, kompensasi, dan kinerja)

3.3.2. Telaah Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan dalam Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Meningkatkan Profesionalitas Aparatur. Sasaran yang akan dicapai dalam Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Meningkatnya pelayanan kediklatan;

Salah satu upaya dalam meningkatkan profesionalitas ASN yaitu melalui peningkatan pelayanan kediklatan. Upaya tersebut juga berimplikasi dengan

peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya berupaya menyelenggarakan kegiatan kediklatan dengan melibatkan kabupaten/kota. Dengan penyelenggaraan kediklatan diharapkan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan meningkat.

2. Meningkatnya kompetensi aparatur;

Salah satu kendala dalam menjadikan ASN yang profesional adalah tingginya gap kompetensi pegawai yang dilihat dari kesesuaian jabatan, kesesuaian tingkat pendidikan, kesesuaian pelatihan dengan jabatan, dan pengalaman jabatan. Dengan tingginya gap kompetensi pegawai tentu akan berdampak buruk pada pelayanan kepada masyarakat. Banyak pekerjaan akan terbengkalai dan tidak terspesialisasi sehingga pegawai sulit mengeluarkan kemampuan sesuai dengan bidangnya. Akibatnya pegawai lebih banyak mengerjakan pekerjaan lain dibandingkan dengan tugas pokoknya. Oleh karena itu menjadi tugas penting BKPSDM dalam mengelola ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar memiliki kesesuaian kompetensi. Semakin sesuai pegawai dengan standar kompetensi yang dimilikinya maka dapat meningkatkan indeks profesionalitas ASN dan pada akhirnya akan meningkatkan indeks reformasi birokrasi.

3. Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur;

Isu rendahnya disiplin dan kinerja ASN sudah merupakan isu sentral ASN. Lambannya pelayanan, banyaknya kasus indisipliner, KKN dan lain sebagainya. Tingginya gap capaian disiplin dan kinerja ini menjadi point BKPSDM dalam mengevaluasi kembali capaian kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apalagi penilaian kinerja saat ini sudah mulai diarahkan pada aspek dan metode yang lebih terukur, mulai dari orientasi pelayanan, integritas, disiplin, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Dengan pertimbangan tingkat capaian kinerja ini sangat memungkinkan untuk memberlakukan *reward and punishment* kepada pegawai. Dengan semakin tingginya capaian kinerja pegawai maka gap disiplin dan kinerja akan semakin kecil dan akan menaikkan indeks Profesionalitas ASN yang pada akhirnya berpengaruh baik pada indeks Reformasi Birokrasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang, BKPSDMD Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) yaitu :

1. Meningkatnya kompetensi aparatur;
2. Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur.

Tabel 3.4
Permasalahan BKPSDMD Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Sasaran Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Permasalahan Pelayanan BKPSDMD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Tingginya gap kompetensi ASN	- Ketidaksesuaian pendidikan, pelatihan, dan pengalaman terhadap jabatan - Belum dilakukannya pengembangan berbasis kompetensi dan assesment kepada seluruh pegawai	- Adanya kegiatan rencana pembinaan karir pegawai - ASN wajib memiliki kompetensi sesuai undang-undang ASN - ASN mempunyai hak mengikuti 20 jam pelatihan /tahun
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Masih rendahnya kinerja ASN	Capaian kinerja belum dijadikan dasar pembayaran tunjangan kinerja	Rencana absensi terintegrasi (kehadiran, kompensasi, dan kinerja)
	Terwujudnya disiplin pegawai	Masih rendahnya disiplin ASN	Masih adanya kasus pelanggaran disiplin dan kode etik	Rencana absensi terintegrasi (kehadiran, kompensasi, dan kinerja)

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis yang perlu ditandatangani dalam pelaksanaan Renstra Badan Kapegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur
2. Penempatan pegawai secara lebih optimal sesuai kompetensi serta Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan.
3. Peningkatan disiplin pegawai
4. Digitalisasi Pelayanan administrasi kepegawaian
5. Peningkatan akurasi data pegawai
6. Peningkatan kinerja SDM Aparatur
7. Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (Flexibel Working Arrangement)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima (5) tahun. Tujuan yang ditetapkan atas dasar pernyataan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu :

“Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)”

Dengan indikator tujuan perangkat daerah yaitu :

“Persentase ASN yang Disiplin”

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu :

"Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Kompetensi"

Dengan indikator sasaran perangkat daerah yaitu :

"Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya"

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel. 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Jangka Menengah						Kondisi Akhir RPJMD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	59,07	59,11	61,39	62,50	63,50	64,50	65,50	65,50	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara			Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	-	-	-	77.20	77.60	78.00	78.40	78.40	
			Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)		Persentase ASN yang disiplin	Nilai	96.50	96.50	97.00	97.00	97.00	98.50	99.00	99.00	
				Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Kompetensi	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	%	75	76	77	78	78	79	80	80	

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompetensi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara.
2. Melakukan peningkatan kualitas manajemen ASN melalui rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah, rencana pengembangan kompetensi ASN dan penyusunan pola karir.
3. Meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kebijakan pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah.

5.2 Kebijakan

Arah Kebijakan yang diambil oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

1. Optimalisasi merit system dalam penempatan pejabat struktural dan fungsional.
2. Perencanaan kebutuhan ASN dengan memiliki tata kelola manajemen kepegawaian yang baik, juga meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan latihan formal dan non formal.
3. Sistem absensi yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian, pembayaran tunjangan kinerja akan didasarkan pada kinerja pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai semuanya dinilai oleh atasan

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan PD dalam tiga tahun mendatang

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	2021	2022	2023
1.	Terlaksananya Penataan ASN Sesuai dengan Kompetensi	Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompetensi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara	Optimalisasi merit system dalam penempatan pejabat struktural dan fungsional.			
		Melakukan peningkatan kualitas manajemen ASN melalui rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah, rencana pengembangan kompetensi ASN dan penyusunan pola karir	Perencanaan kebutuhan ASN dengan memiliki tata kelola manajemen kepegawaian yang baik, juga meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan latihan formal dan non formal			
		Meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kebijakan pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah.	Sistem absensi yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian, pembayaran tunjangan kinerja akan didasarkan pada kinerja pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai semuanya dinilai oleh atasan			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang, akan melaksanakan 3 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ditampilkan pada Tabel 6.1.c (terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang. Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BKPSDMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	54,15	54,69	55,37	61,50	67,62	78,50	95,51	95,51	BKPSDMD
Indeks Reformasi Birokrasi sub komponen penataan sistem manajemen SDM	Nilai	NA	NA	62,50	63,00	63,50	64,00	64,50	64,50	
Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	%	NA	NA	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	
Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	%	NA	NA	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	BKPSDMD
Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	5,06	5,98	6,66	7,04	7,03	7,07	7,03	7,03	
Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Perubahan Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra Perubahan dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Perubahan dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan ini dapat tercapai.
3. Renstra Perubahan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra Perubahan.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perubahan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Perubahan secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN

Tabel 6.1a
Pendaftaran BPJSMD Kota Pangkalpinang[illegible]

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode		Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Tahun 2020					
												target	Rp	Realisasi	target	Rp	Realisasi			
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tertakannya layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang tertangani	jenis	2	2	2	4,000,000	1	3,680,000	12	2,950,000	12	2,500,000	
						Penyediaan Bahan Bacaan/ Buku Peraturan Perundang-undangan	Tertakannya layanan Penyediaan Bahan Bacaan/ Buku Peraturan Perundang-undangan	Jumlah layanan Penyediaan Bahan Bacaan/ Buku Peraturan Perundang-undangan yang tertangani	jenis	1	1	1	6,000,000	1	5,960,000	0	-	-	-	
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Tertakannya layanan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani	bulan	12	12	12	10,670,000	12	9,910,000	12	4,440,000	12	2,940,000	
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Tertakannya layanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Jumlah layanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah yang tertangani	kali	55	55	55	350,000,000	55	335,406,772	12	74,840,141	12	73,406,542	
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		5	5	6	186,810,000	6	168,045,264	6	140,289,000	8	136,527,798	
						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	jenis	-	-					0	0	0	0	
						Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair	Jumlah meubelair yang tersedia	unit	-	-	-	0			0	-	-	-	
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	kali	1	1	1	43,350,000	1	43,350,000	1	21,300,000	1	21,300,000	
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	unit	4	4	5	143,460,000	5	124,695,264	5	118,989,000	5	115,227,798	
						Rehabilitasi Sedang /berat kendaraan / Dinas/ Operasional	Terehabilitasinya kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang mendapat rehabilitasi sedang/berat	unit	-	-					0	-	-	-	
						Pengadaan mesin/ kartu absensi	Tersedianya mesin/ kartu absensi	Jumlah absensi sidik jari yang disediakan	set	-	-					0	-	-	-	
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur	%		46	46	28,500,000	46	27,900,000	-	0	0	0	
						Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	sis	-	46	46	28,500,000	46	27,900,000	0	-	-	-	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode		Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Tahun 2020				
												target	Rp	Realisasi	target	Rp	Realisasi		
	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja	Melakukan penataan terhadap laporan capaian kinerja					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (OPD)	Nilai	55.56	59.03	60.20				60.40			
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan		9	9	9	18,000,000	9	16,604,000	38	22,730,000	38	22,500,000
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD yang disusun	jenis	3	3	3	2,000,000	3	2,000,000	3	4,940,000	3	4,940,000
						Penyusunan laporan keuangan semesteran/ prognosis keuangan	Tersusunnya laporan keuangan semesteran/	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	jenis	1	1	1	2,000,000	1	2,000,000	1	4,290,000	1	4,060,000
						Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	jenis	1	1	1	2,000,000	1	2,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
						Penyusunan rencana kerja, RKA, dan DPA	Tersusunnya RENJA (RKT, RKA, DPA)	Jumlah laporan Renja, RKA dan DPA yang disusun	jenis	3	3	3	2,000,000	3	2,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000
						Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tersusunnya laporan SPIP	Jumlah laporan SPIP yang disusun	jenis	1	1	1	10,000,000	1	8,604,000	-	0	0	0
						Forum Perangkat Daerah	Terlaksananya forum perangkat daerah	Jumlah pemangku kepentingan yang hadir	peserta	-	-	-	0		30	3,500,000	30	3,500,000	
						Penyusunan Renstra	Tersusunnya Renstra	Jumlah jenis laporan perencanaan jangka menengah yang disusun	jenis	-	-	-	0		-	0	0	0	
	Terlaksananya Penataan ASN Sesuai dengan Kompetensi	Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompetensi	Optimalisasi merit system dalam penempatan pejabat struktural dan fungsional					Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	%	70.00	72.00	75.00			76.00				
						Program Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Penempatan Pejabat Struktural dan Fungsional sesuai dengan kompetensi								4979	1,841,982,453	4,992	1,661,765,602	
								Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi		47.76	53.29	58.82			64.35				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Tahun 2020					
											target	Rp	Realisasi	target	Rp	Realisasi			
							Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	54,15	54,69	55,37				61,50				
							Indeks Reformasi Birokrasi (Sub Komponen penataan sistem manajemen SDM)	Nilai	NA	NA	61,50				62,50				
							Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	%	NA	NA	80				85				
							Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	%	NA	NA	70				75				
					Pendidikan dan penjurangan struktural bagi PNS	Tertaksananya Pendidikan dan penjurangan struktural bagi pejabat eselon	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan penjurangan struktural	Orang	-	4					5	6.116,800	-	6.116,800	
					Pengukuran Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Tertaksananya Pengukuran Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Jumlah OPD yang disertifikasi dalam menilai pelayanan kepegawaian	OPD							0	-	-	-	
					Pengukuran Indeks Profesional ASN	Tertaksananya Pengukuran Indeks Profesional ASN	Jumlah ASN yang akan dinilai								0	-	-	-	
					Proses Pemulangan ASN yang meninggal dunia	Tertaksananya Proses Pemulangan ASN yang meninggal dunia	Jumlah Proses Pemulangan ASN yang meninggal dunia	bulan							0	-	-	-	
					Pendidikan dan Pelatihan Kepamongrajan bagi Camat	Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepamongrajan bagi Camat	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepamongrajan bagi Camat	Orang	-	-					0	-	-	-	
					Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas	Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas	Orang	-	-					0	-	-	-	
					Proses penyelesaian cuti bagi ASN Kota Pangkajene	Tertaksananya Proses penyelesaian cuti bagi ASN Kota Pangkajene	Jumlah penyelesaian Cuti ASN Kota Pangkajene	orang							10	27.350,000	10	24.400,000	
					Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	Tertaksananya Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	Orang	-	-					0	-	-	-	
					Pelatihan Dasar Bagi CASN Daerah	Tertaksananya Pelatihan Dasar Bagi CASN Daerah	Jumlah CASN yang mengikuti Pelatihan Dasar	Orang	-	-					0	-	-	-	
					Binik dan uji sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Tertaksananya Binik dan uji sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah ASN yang lulus uji sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Orang	-	-					0	-	-	-	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Tahun 2020							
											target	Rp	Realisasi	target	Rp	Realisasi					
						Uji Kompetensi bag ASN Kota Pangkajene	Tertaksananya Uji Kompetensi bag ASN Kota Pangkajene	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	Orang	-	-						16	113.900.600	17	113.900.600	
						Workshop Standarisasi dan Sertifikasi ASN	Tertaksananya Workshop Standarisasi dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mempunyai sertifikasi sesuai dengan kompetensi keahlian dalam jabatan	Orang	-	-						0	-	-	-	
						Pelatihan Pengukuran Indeks Profesional ASN	Tertaksananya Pelatihan Pengukuran Indeks Profesional ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Pengukuran Indeks Profesional ASN	Orang	-	-						0	-	-	-	
						Workshop Pengembangan Kompetensi PNS	Tertaksananya Workshop Pengembangan Kompetensi PNS	Jumlah ASN yang mengikuti workshop Pengembangan Kompetensi	Orang	-	-						0	-	-	-	
						Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemkot Pangkajene	Tertaksananya Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemkot Pangkajene	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemkot Pangkajene	Orang	-	-						0	-	-	-	
						Sosialisasi reformasi birokrasi aparatur	Tertaksananya Sosialisasi reformasi birokrasi aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi reformasi birokrasi	orang	-	-						0	0	0	0	
						Pembekalan dan pelatihan kewirausahaan bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun	Tertaksananya Pembekalan dan pelatihan kewirausahaan bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun	Jumlah ASN yang mendapat pembekalan dan pelatihan	Orang	-	-						0	-	-	-	
						Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Tertaksananya Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah pelaksanaan pembinaan karir ASN	kali	-	4	4					10	106.500.000	10	96.025.000	
						Peningkatan dan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Tertaksananya Peningkatan dan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang disiplin	kasus	-	-	24					6	24.800.000	6	24.452.800	
						Seleksi penerimaan CASN dan pelamar umum	Tertaksananya Seleksi penerimaan CASN dan pelamar umum	Jumlah peserta seleksi CASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan	orang	-	-	265					166	431.578.762	166	401.176.161	
						Pengelolaan administrasi CASN menjadi ASN	Tertaksananya Pengelolaan administrasi CASN	Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN	orang	-	-	-					250	19.600.000	250	18.900.000	
						Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Tertaksananya Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	orang	-	436	692					600	125.239.500	600	112.412.227	
						Pengelolaan Data ASN sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	Tertaksananya Pengelolaan Data ASN sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola	data	-	-	-					3000	246.389.194	3.000	246.269.194	
						Penyusunan formasi pegawai	Tertaksananya Penyusunan formasi	Jumlah formasi yang diusulkan	formasi	-	0	275					250	9.193.500	250	9.193.500	
						Pemberian penghargaan bagi PNS yang memiliki masa kerja 10, 20, 30 Tahun	Tertaksananya Pemberian penghargaan bagi PNS yang memiliki masa kerja 10, 20, 30 Tahun	Jumlah ASN yang menerima penghargaan	orang	-	220	98					200	15.866.000	200	13.150.000	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Tahun 2020							
											target	Rp	Realisasi	target	Rp	Realisasi					
						Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS	Tertaksananya Pengelolaan Administrasi Pensiun	Jumlah SK pensiun yg diterbitkan	orang	102	99						100	65.500.000	90	59.199.000	
						Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS	Tertaksananya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS	Jumlah ASN Pemkot Pengulpmang yang menerima bantuan biaya tugas belajar	orang	11	5						7	43.010.600	1	28.610.600	
						Penyelesaian Administrasi Karpag, Karas/ Karsu, Askes, Taperum, dan Taspen	Tertaksananya Penyelesaian Administrasi Karpag, Karas/ Karsu, Askes, Taperum, dan Taspen	Jumlah Karpag, Karas/Karsu, Taperum, Askes dan Taspen yg diterbitkan	kartu	211	17						150	11.750.000	150	9.950.000	
						Pengelolaan dan Pengembangan Website Kepegawaian	Tertaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Website Kepegawaian	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	website	-	-						2	24.425.000	2	24.175.000	
						Penataan Arsip	Tertaksananya Penataan Arsip	Jumlah arsip kepegawaian yang data	meter lari	-	-						0	-	-	-	
						Pengelolaan Administrasi Dalam Jabatan Fungsional	Tertaksananya Pengelolaan Administrasi Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional	orang	148	174						30	40.000.000	30	39.143.000	
						Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Tertaksananya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi yang	kali	2	-						1	245.224.159	3	163.615.142	
						Seleksi Mutasi PNS (Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar)	Tertaksananya Seleksi Mutasi PNS (Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar)	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi masuk dan keluar	orang	-	-						30	6.811.238	-	6.811.238	
						Pengelolaan dan Pengembangan Elektronik Sistem Management Informasi Layanan Kepegawaian Daerah (E-SMILE)	Tertaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Elektronik Sistem Management Informasi Layanan Kepegawaian Daerah (E-SMILE)	Jumlah jenis data yang tersusun	1 Jenis Data Elektronik	-	-						1	116.300.000	1	116.200.000	
						Pembinaan pegawai KORPRI	Tertaksananya Pembinaan pegawai	Jumlah pelaksanaan HUT KORPRI	kali	1	1						0	-	-	-	
						Penyelenggaraan MTQ KORPRI	Tertaksananya Penyelenggaraan	Jumlah cabang yang diombakan	jenis	-	-						0	-	-	-	
						Pekan Olahraga KORPRI	Tertaksananya Pekan Olahraga KORPRI	Jumlah cabang yang diombakan	jenis	-	-						0	-	-	-	
						Pembinaan mental dan rohani PNS	Tertaksananya Pembinaan mental	Jumlah pelaksanaan pembinaan	kali	-	-						0	-	-	-	
						Penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Kepegawaian	Tertaksananya Penyusunan NSPK (Norma, Standar Prosedur dan Kriteria) Kepegawaian	Jumlah NSPK yang selesai disusun	Jenis	-	-						0	-	-	-	
						Gala Karya	Tertaksananya Gala Karya	Jumlah tim pembinaan olahraga KORPRI	tim	-	-						0	-	-	-	
						Pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi	Tertaksananya Pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi	Jumlah ASN berprestasi yang menerima penghargaan	orang	-	-						0	-	-	-	
						Rakor kepegawaian	Tertaksananya Rakor kepegawaian	Jumlah peserta yang mengikuti Rakor Kepegawaian	orang	-	-						0	-	-	-	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Tahun 2020						
											target	Rp	Realisasi	target	Rp	Realisasi				
						Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Tertaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Jumlah-ASN yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian Ijazah	orang							100	113.000.000	100	102.418,240	
						Pengadaan E-LHKPN	Tertaksananya Pengadaan E-LHKPN	Jumlah-Kepatuhan pelaporan LHKPN secara elektronik	orang							43	47.625.100	43	45.625.100	
						Diklat Pembangunan Karakter Bangsa	Tertaksananya Diklat Pembangunan Karakter Bangsa	Jumlah-ASN yang mengikuti diklat	orang							0	-			
	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi ASN Melalui Berbagai Diklat dan Pelatihan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN melalui berbagai diklat dan pelatihan.	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan formal dan non formal.				Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%	75	76	77,00				78,00					
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Berkapasitas	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	%	18	4	170	188.057,000	170	154.531,171	100	28.650,000	32	27.961,000	
						Diklat formal	Tertaksananya Diklat formal	Jumlah-ASN yang mengikuti diklat formal	orang	18	4	20	45.000,000	20	39.089.667	10	9.400,000	7	9.400,000	
						Ujian dinas dan Ujian penyesuaian Ijazah	Tertaksananya Ujian dinas dan Ujian penyesuaian Ijazah	Jumlah-PNS yang mengikuti Ujian dinas dan Ujian penyesuaian Ijazah	Orang	-	-	100	108.057,000	100	81.928.004	0	-	-	-	
						Peningkatan masa kerja dan peningkatan pendidikan PNS	Tertaksananya Peningkatan masa kerja dan peningkatan pendidikan PNS	Jumlah-ASN yang mendapat tambahan masa kerja dan peningkatan pendidikan	orang	-	-	50	35.000,000	50	33.513.500	25	19.250,000	25	18.561,000	
						Sosialisasi P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)	Tertaksananya Sosialisasi P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)	Jumlah-ASN yang mendapatkan sosialisasi P4GN	orang	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	
						Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tertaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah-pakaian dinas yang diadakan	sat	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	
						Program Peningkatan Pelayanan KORPRI	Meningkatnya Pelayanan KORPRI	Persentase pelayanan anggota KORPRI		150	150	150	300.000,000	1	283.471,200					
						Pembinaan pegawai KORPRI	Tertaksananya Pembinaan pegawai KORPRI	Jumlah pelaksanaan HUT KORPRI, Jumlah aktif dan resmi yang dikirim	kat, orang	1	1	1, 150	300.000,000	1	283.471,200					
						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Upaya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase terpenuhinya upaya pembinaan dan pengembangan aparatur		1,135	1,360	2,393	2.039,526,000	2,390	1,623,337,031					

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode		Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Tahun 2020				
												target	Rp	Realisasi	target	Rp	Realisasi		
						Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Tertaksananya Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah-pelaksanaan pembinaan karir ASN	kali	4	4	4	140,000,000	4	119,107,540				
						Pengelolaan administrasi CASN menjadi ASN	Tertaksananya Pengelolaan administrasi CASN menjadi ASN	Jumlah-CASN yang diangkat menjadi ASN	orang	-	-	1	25,000,000	1	19,592,004				
						Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Tertaksananya Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah-SK pangkat ASN yang diterbitkan	orang	436	662	611	170,000,000	611	161,451,020				
						Pengembangan/ Pembangunan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	Tertaksananya Pengembangan/ Pembangunan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	Jumlah-sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang dikembangkan	sistem	1	1	1	326,525,000	1	298,173,062				
						Penyusunan formasi pegawai	Tertaksananya Penyusunan formasi	Jumlah-formasi yang diusulkan	formasi	0	1	621	43,000,000	621	40,481,247				
						Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS	Tertaksananya Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS	Jumlah-SK pensiun yg diterbitkan	orang	102	99	150	90,000,000	148	85,295,487				
						Penyelesaian Administrasi Karpeg, Karis/ Karis, Askes, Taperum, dan Taspen	Tertaksananya Penyelesaian Administrasi Karpeg, Karis/ Karis, Askes, Taperum, dan Taspen	Jumlah-Karpeg, Karis/Karis, Taperum, Askes dan Taspen yg diterbitkan	karu	211	17	300	30,000,000	300	25,563,500				
						Pengelolaan Administrasi Dalam Jabatan Fungsional	Tertaksananya Pengelolaan Administrasi Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah-ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional	orang	148	174	100	50,000,000	100	49,610,591				
						Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Tertaksananya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah-pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi yang terlaksnainya	kali	2	-	1	205,000,000	1	185,192,410				
						Seleksi penerimaan CASN dari pelamar umum	Tertaksananya Seleksi penerimaan CASN dari pelamar umum	Jumlah-peserta seleksi CASN yang lulus sesuai dengan formasi yang disetujui	orang	-	295	250	395,000,000	250	194,426,000				
						Pemberian penghargaan bagi PNS yang memiliki masa kerja 10, 20, 30 Tahun	Tertaksananya Pemberian penghargaan bagi PNS yang memiliki masa kerja 10, 20, 30 Tahun	Jumlah-ASN yang menerima penghargaan	orang	220	98	200	20,000,000	200	10,680,000				
						Pengelolaan dan Pengembangan Website Kepegawaian	Tertaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Website Kepegawaian	Jumlah-website yang dikelola dan dikembangkan	website	-	-	1	50,000,000	1	49,558,000				
						Peningkatan dan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Tertaksananya Peningkatan dan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah-penyelesaian kasus ASN yang indisipliner	kasus	-	24	5	45,000,000	5	37,727,300				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Tahun 2020					
											target	Rp	Realisasi	target	Rp	Realisasi			
						Pengelolaan dan Pengembangan Elektronik Sistem Management Informasi Layanan Kepegawaian Daerah (E-Smile)	Tertaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Elektronik Sistem Management Informasi Layanan Kepegawaian Daerah (E-Smile)	Jumlah jenis data yang tersusun	jenis data elektronik			1	70.000,000	1	63.510,100				
						Penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) Kepegawaian	Tertaksananya Penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) Kepegawaian	Jumlah NSPK yang selesai disusun	jenis			2	40.000,000	1	20.340,400				
						Workshop Pengembangan Kompetensi ASN	Tertaksananya Workshop Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti workshop pengembangan kompetensi ASN	orang			70	80.000,000	70	70.030,900				
						Pelatihan Pengukuran Indeks Profesional ASN	Tertaksananya Pelatihan Pengukuran Indeks Profesional ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pengukuran indeks profesional ASN	orang			70	80.000,000	70	70.164,300				
						Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS	Tertaksananya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS	Jumlah ASN Pemkot Pangkatpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar	orang	11	5	5	180.000,000	5	142.413,170				
						Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya Pendidikan Kedinasan Pejabat Struktural	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan kedinasan			100	100	180.000,000		175.671,100				
						Pendidikan dan penjurangan struktural bagi PNS	Tertaksananya Pendidikan dan penjurangan struktural bagi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan penjurangan struktural	orang	-	4	5	180.000,000	5	175.671,100				
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Teknis)	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Berkapasitas	Persentase aparatur yang mengikuti diklat peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100	2.775.471,000		2.382.240,626				
						Sosialisasi reformasi birokrasi aparatur	Tertaksananya Sosialisasi reformasi birokrasi aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi reformasi birokrasi	orang			60	200.000,000	50	93.717,830				
						Pelatihan dasar bag CPNS daerah	Tertaksananya Pelatihan dasar bag CPNS daerah	Jumlah CASN yang mengikuti pelatihan dasar	orang	-	-	268	2.575.471,000	268	2.268.522,796				
													6.422.072,150		5.451.072,481		2.366.364,594		2.175.448,062

Tabel 6.1.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BKPSDMD Kota Pengkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output))	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Karangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2015	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)				Persentase ASN yang disiplin		Nilai	97.00	97.00	97.00		99.50		99.00		99.00			
	Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Standar Kompetensi			Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya		Nilai	77.00	78.00	78.00		79.00		80.00		80.00			
		01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						5,793,895,821		6,027,434,875		6,368,682,000		18,199,913,696		
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan yang disampaikan : Jumlah laporan yang harus disampaikan x 100 %	%	100	100	100		100		100		100			
		01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja diselesaikan tepat waktu DISAGI Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja DIKALI 100	%		100	16,000,000	100	13,750,000	100	14,000,000	100	43,750,000		
		01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENCANA/REHJA BKPSDMD yang tersusun		Dokumen			3	6,000,000	1	4,000,000	2	4,000,000	6	14,000,000	
				04 Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA BKPSDMD yang tersusun		Dokumen		-	1	2,750,000	1	2,750,000	1	2,750,000	3	8,250,000	
				05 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA BKPSDMD yang tersusun		Dokumen		-	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	3	7,500,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (SKPJ, LKPJ AM, LPPD) yang tersusun	Dokumen		-	2	2,750,000	2	2,500,000	3	2,750,000	7	8,000,000	
			07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen SPIP, LAKIP, dan RB)	Dokumen		-	3	2,000,000	3	2,000,000	3	2,000,000	9	6,000,000	
		01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Jumlah layanan administrasi Keuangan yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Keuangan yang dianggarkan DIKALU 100	%		100	5,102,062,171	100	5,107,184,875	100	5,398,183,000	100	15,568,430,046	
			01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang			35	5,089,562,171	35	5,094,184,875	45	5,346,883,000	45	15,530,430,046	
			03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penilaian dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen			1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	3	7,500,000	
			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan rekrutasi pelaksanaan akuntansi SKPD	laporan			1	2,000,000	1	2,500,000	1	2,000,000	3	6,500,000	
			05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan			1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	3	9,000,000	
			06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	dokumen			1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	3	6,000,000	
			07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	laporan			1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	3	9,000,000	
		01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah layanan administrasi Barang Milik Daerah yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Barang Milik Daerah yang dianggarkan DIKALU 100	%		100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	12,000,000	

Tajuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp		target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen			1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	3	6,000,000		
			05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	Laporan			1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	3	6,000,000		
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi : jumlah seluruh pegawai x 100 %	%	100	100	100		100		100		100			
		01	2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawain	Jumlah layanan administrasi kepegawain yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Kepegawain yang dianggarkan DIKALI 100	%		100	56,900,900	100	100,000,000	100	87,000,000	100	243,900,900		
			01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	unit			-	-	0	1	25,000,000	1	20,000,000	2	45,000,000	
			02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Sel			46	31,000,000	47	35,000,000	46	32,000,000	139	98,000,000		
			07	Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan ASN yang meninggal dunia	Orang			2	10,000,000	3	15,000,000	2	10,000,000	7	35,000,000		
			09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sesuai tugas dan fungsi	Orang			5	15,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	15	65,000,000		
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah kebutuhan adm perkantoran yang terpenuhi : Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang di rencanakan x 100 %	%	100	100	100		100		100		100			
		01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Umum yang dianggarkan DIKALI 100	%		100	125,633,650	100	182,500,000	100	218,000,000	100	518,133,650		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis			11	10,000,000	11	15,000,000	11	15,000,000	33	40,000,000	
			03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Perlatan Rumah Tangga yang disediakan	set			12	5,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	36	25,000,000	
			04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	jenis			4	20,500,000	4	25,000,000	4	25,000,000	12	70,500,000	
			05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Set			14	10,000,000	14	15,000,000	14	15,000,000	42	40,000,000	
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	koran			3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	9	15,000,000	
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	kali			20	75,133,650	35	100,000,000	35	125,000,000	90	300,133,650	
			10	Penatausahaan Aspek Dinamis Pada SKPD	Jumlah aspek dinamis yang dilata	berkas			-	-	50	12,500,000	50	15,000,000	100	27,500,000	
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik : jumlah sarana dan prasarana yang tersedia x 100 %	%	100	100	100		100		100		100		
		01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur yang tersedia DISAGI dengan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan DIKALI 100	%			100	30,000,000	100	30,000,000	100	75,000,000	100	135,000,000	
			05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang disediakan	Unit			0	-	1	20,000,000	4	20,000,000	5	40,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit			0	-	0	-	2	25,000,000	2	25,000,000		
					Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah kebutuhan admn perkantoran yang terpenuhi : Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang di rencanakan x 100 %	%	100	100	100		100		100		100		
		01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	Jumlah layanan Jasa terpenuhi DIBAGI jumlah layanan Jasa yang dibutuhkan DIKALI 100	%			100	320,000,000	100	395,000,000	100	362,500,000	100	1,677,500,000	
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang tertata	surat			0	-	50	5,000,000	50	5,000,000	100	10,000,000		
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	orang			46	110,000,000	46	150,000,000	46	125,000,000	46	385,000,000		
			03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	unit			12	10,000,000	26	30,000,000	15	17,500,000	53	57,500,000		
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	orang			46	200,000,000	46	210,000,000	46	215,000,000	46	625,000,000		
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik : jumlah sarana dan prasaran yang tersedia x 100 %	%	100	100	100		100		100		100		
		01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan terpenuhi DIBAGI jumlah layanan pemeliharaan yang dibutuhkan DIKALI 100	%			100	140,000,000	100	205,000,000	100	257,000,000	100	602,000,000	
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit			1	40,000,000	1	65,000,000	1	65,000,000	1	170,000,000		

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			02	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan	orang			200	20,000,000	165	75,000,000	165	75,000,000	300	170,000,000	
			03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN	Orang			150	5,000,000	165	25,000,000	165	25,000,000	300	55,000,000	
			06	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberdayaan	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	Orang			100	50,000,000	100	70,000,000	110	80,000,000	310	200,000,000	
			08	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah pelaksanaan perayaan HUT KORPRI	event			3	100,000,000	3	110,000,000	3	125,000,000	9	335,000,000	
			09	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile	data			3,000	350,000,000	3,000	350,000,000	3,000	350,000,000	3,000	1,050,000,000	
			10	Pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	website			1	55,000,000	1	70,000,000	1	75,000,000	1	200,000,000	
			11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola	orang			200	65,000,000	250	70,000,000	265	75,000,000	715	210,000,000	
				Rasio pegawai fungsional	Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan); seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100 %	%	6.66	7.04	7.05		7.5		7.8		7.8		
		2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	Jumlah ASNpelaksanaan mutasi dan promosi dibagi target ASNpelaksanaan yang dianggarkan dikali 100	%			100	260,000,000	100	287,500,000	100	300,000,000	100	847,500,000	
			01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi	Orang			15	145,000,000	20	150,000,000	25	155,000,000	60	450,000,000	
			02	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	Orang			600	50,000,000	600	65,000,000	600	70,000,000	1,800	185,000,000	
			03	Pengadaan promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS	kali			6	65,000,000	11	72,500,000	12	75,000,000	29	212,500,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Pemanggang Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia							582,000,000		1,175,000,000		900,000,000		2,657,000,000	
				Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	Jumlah ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi yang duduk diseti jabatan : Jumlah ASN yang menduduki jabatan x 100 %		60.54	65.41	77.00		78.00		79.00		79.00		
		2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi target dikali 100	%			100	167,000,000	100	175,000,000	100	200,000,000	100	542,000,000	
			03	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, nilai dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan dikali teknis dan fungsi	Orang			100	167,000,000	100	175,000,000	125	200,000,000	325	542,000,000	
		2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti dibagi target dikali 100	%			100	415,000,000	100	1,000,000,000	100	700,000,000	100	2,115,000,000	
			07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan kepemimpinan dan prajabatan	Orang			20	415,000,000	150	1,000,000,000	30	700,000,000	200	2,115,000,000	
										7,522,895,821		8,949,934,875		8,801,683,000		24,974,313,896	

Tabel 6.1.c
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BKPSDMD Kota Pangkalpinang

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan RPJMD Kota Pangkalpinang																	
Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023				
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)						Persentase ASN yang disiplin		Nilai	97.00	97.00	98,50		99.00		99.00		
	Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Standar Kompetensi					Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya		Nilai	77.00	78.00	79.00		80.00		80.00		
		01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								6,037,434,875		6,368,683,000		12,406,117,875	
					Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan kinerja dan keuangan tahun berkenaan yang disampaikan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun pada tahun berkenaan x 100%	%	100	100	100		100		100		
		01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	Laporan			5	13,750,000	5	14,000,000	10	27,750,000	
		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen			3	4,000,000	2	4,000,000	5	8,000,000	
			04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		Dokumen		-	1	2,750,000	1	2,750,000	2	5,500,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
										target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	
			05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		Dokumen	-	1	2,500,000	1	2,500,000	2	5,000,000		
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Laporan	-	2	2,500,000	3	2,750,000	5	5,250,000		
			07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tertaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah		Laporan	-	3	2,000,000	3	2,000,000	6	4,000,000		
		01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Laporan		3	5,107,184,875	3	5,359,183,000	6	10,466,367,875		
			01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan		34	5,094,184,875	34	5,346,683,000	34	10,440,867,875		
			05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan		1	8,000,000	1	7,500,000	2	15,500,000		
			07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	laporan		1	5,000,000	1	5,000,000	2	10,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		target	Rp
										target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18			
		01	2.03	Administrasi Berang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tertekannya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Laporan			1	4,000,000	1	4,000,000	2	8,000,000		
			01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD		Dokumen			1	4,000,000	1	4,000,000	2	8,000,000		
				Terwujudnya ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis/workshop pada tahun berkenaan dibagi jumlah target ASN di tahun berkenaan x 100 %	%	100	100	100		100		100				
		01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertekannya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan			2	100,000,000	2	87,000,000	4	187,000,000		
			02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		paket			1	35,000,000	1	38,000,000	2	73,000,000		
			09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tertekannya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Orang			2	100,000,000	2	87,000,000	4	187,000,000		
				Terperuhnya kebutuhan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	Persentase terperuhnya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang direncanakan dibagi jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang terealisasi pada tahun berkenaan x 100%	%	100	100	100		100		100				
		01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertekannya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Laporan			5	182,500,000	5	210,000,000	10	392,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023				
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket			1	15,000,000	1	15,000,000	2	30,000,000	
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket			2	10,000,000	2	10,000,000	4	20,000,000	
			04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket			2	25,000,000	2	25,000,000	4	50,000,000	
			05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket			2	15,000,000	2	15,000,000	4	30,000,000	
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan			1	117,500,000	1	145,000,000	2	262,500,000	
					Terpenuhiya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pada tahun berkenaan dalam kondisi baik dibagi jumlah total sarana dan prasarana pada tahun berkenaan x 100%	%	100	100	100		100			
		01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah laporan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Laporan			1	30,000,000	1	75,000,000	2	105,000,000	
			07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya aset tetap lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	unit			1	30,000,000	2	75,000,000	3	105,000,000	
					Terpenuhiya kebutuhan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	Persentase terpenuhiya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang direncanakan dibagi jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang terealisasi pada tahun berkenaan x 100%	%	100	100	100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Fomula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		target	Rp
										target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18			
		01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan			3	395,000,000	3	362,500,000	6	757,500,000		
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan persediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		laporan			1	155,000,000	1	130,000,000	46	285,000,000		
			03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		laporan			1	30,000,000	1	17,500,000	2	47,500,000		
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		laporan			1	210,000,000	1	215,000,000	46	425,000,000		
					Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pada tahun berkenaan dalam kondisi baik dibagi jumlah total sarana dan prasarana pada tahun berkenaan x 100%	%	100	100	100		100		100			
		01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah laporan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Laporan			3	205,000,000	3	257,000,000	6	462,000,000		
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		Unit			1	65,000,000	1	90,000,000	1	155,000,000		
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		Unit			4	110,000,000	4	135,000,000	4	245,000,000		
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Unit			1	30,000,000	1	32,000,000	2	62,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
										target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18
			KEPEGAWAIAN													
		5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Penempatan Pejabat Struktural dan Fungsional sesuai dengan kompetensi							1,437,500,000		1,533,000,000		2,970,500,000	
					Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Pendidikan PT ke atas : jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah x 100 %	%	100	100	100		100		100		
		2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN dibagi target dianggarkan dikali 100	laporan			7	770,000,000	7	805,000,000	14	1,575,000,000	
			02	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Dokumen			2	75,000,000	2	75,000,000	300	150,000,000	
			03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen			458	25,000,000	193	25,000,000	300	50,000,000	
			06	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Dokumen			100	70,000,000	110	80,000,000	210	150,000,000	
			08	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Tertfasilitasinya lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Lembaga			1	110,000,000	1	125,000,000	2	235,000,000	
			09	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Terlaksananya perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Dokumen			3,000	350,000,000	3,000	350,000,000	3,000	700,000,000	
			10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen			30	70,000,000	30	75,000,000	1	145,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
										target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18
			11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Dokumen			5	70,000,000	5	75,000,000	10	145,000,000	
					Rasio pegawai fungsional	Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan): seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100 %	%	6.66	7.04	7.5		7.8		7.8		
		2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya mutasi dan promosi ASN	Jumlah laporan pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	Jumlah Laporan pelaksanaan mutasi dan promosi ASN dibagi target dikali 100	Laporan			3	287,500,000	3	300,000,000	6	587,500,000	
			01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya mutasi ASN yang meliputi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Dokumen			20	150,000,000	25	155,000,000	45	305,000,000	
			02	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Terlaksananya pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Dokumen			600	65,000,000	600	70,000,000	1,200	135,000,000	
			03	Pengelolaan promosi ASN	Terlaksananya pengelolaan pengembangan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Dokumen			50	72,500,000	50	75,000,000	100	147,500,000	
					Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100 %	%	100	100	100		100		100		
		2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	jumlah laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi target	laporan			3	295,000,000	3	335,000,000	6	630,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
										target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18
			01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya kapasitas ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Orang			100	100,000,000	125	125,000,000	225	225,000,000	
			04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Tertaksananya pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang			5	150,000,000	5	150,000,000	10	300,000,000	
			14	Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Meningkatnya karir ASN Jabatan Fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	Orang			30	45,000,000	30	60,000,000	60	105,000,000	
		2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tertaksananya penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur dibagi target	Laporan			3	85,000,000	3	93,000,000	6	178,000,000	
			02	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Tertaksananya pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen			3,000	40,000,000	3,000	45,000,000	3,000	85,000,000	
			04	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Tertaksananya pemberian penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	orang			200	22,500,000	150	23,000,000	350	45,500,000	
			06	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Tertaksananya penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Laporan			5	22,500,000	5	25,000,000	10	47,500,000	
		5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
	5.04.02		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia								1,175,000,000		900,000,000		2,075,000,000	
					Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	Jumlah ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi yang duduk disatu jabatan : jumlah ASN yang menduduki jabatan x 100 %		60.54	65.41	78.00		79.00		79.00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
										target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	
		2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis		Jumlah laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi target	Laporan			1	175,000,000	1	200,000,000	2	375,000,000	
			03	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang			50	175,000,000	50	200,000,000	100	375,000,000	
		2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah laporan hasil pelaksanaan	Laporan			1	1,000,000,000	1	700,000,000	2	1,700,000,000	
			07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Laporan			1	1,000,000,000	1	700,000,000	2	1,700,000,000	
											8.649.934.875		8.901.683.000		17.451.617.875	

Tabel 7.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BKPSDMD Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode 5 tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022 target	Tahun 2023 target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)				Persentase ASN yang disiplin		Nilai	97,00	97,00	98,50	99,00	99,00	
	Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Standar Kompetensi			Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya		Nilai	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
			Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan kinerja dan keuangan tahun berkenaan yang disampaikan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun pada tahun berkenaan x 100%	%	100	100	100	100	100	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	Laporan			10	10	20	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Dokumen			3	2	5	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022 target	Tahun 2023 target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		Dokumen		-	1	1	2	
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		Dokumen		-	1	1	2	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Laporan		-	2	3	5	
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tertelaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		Laporan		-	3	3	6	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertelaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan			3	3	6	
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		orang/bulan			34	34	34	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022 target	Tahun 2023 target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Laporan			1	1	2	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		Laporan			1	1	2	
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Laporan			1	1	2	
		Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD		Dokumen			1	1	2	
			Terwujudnya ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/diklat/workshop pada tahun berkenaan dibagi jumlah target ASN di tahun berkenaan x 100 %	%	100	100	100	100	100	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan			1	1	2	
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tersedianya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Orang			2	2	4	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022 target	Tahun 2023 target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang direncanakan dibagi jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang terealisasi pada tahun berkenaan x 100%	%	100	100	100	100	100	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Laporan			5	5	10	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		paket			1	1	2	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		paket			2	2	4	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		paket			2	2	4	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		paket			2	2	4	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Laporan			1	1	2	
			Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pada tahun berkenaan dalam kondisi baik dibagi jumlah total sarana dan prasarana pada tahun berkenaan x 100%	%	100	100	100	100	100	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode 2019-2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022 target	Tahun 2023 target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Unit			1	1	2	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya aset tetap lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan		unit			1	1	2	
			Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang direncanakan dibagi jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang terealisasi pada tahun berkenaan x 100%	%	100	100	100	100	100	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan			3	3	94	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		laporan			1	1	46	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		laporan			1	1	2	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		laporan			1	1	46	
			Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pada tahun berkenaan dalam kondisi baik dibagi jumlah total sarana dan prasarana pada tahun berkenaan x 100%	%	100	100	100	100	100	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode 5 tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022 target	Tahun 2023 target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Unit			6	6	7	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		Unit			1	1	1	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedanya jasa pemeliharaan, pajak dan penzinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan penzinannya		Unit			4	4	4	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Unit			1	1	2	
		KEPEGAWAIAN										
		Program Kepegawaian Daerah	Tertaksananya Penempatan Pejabat Struktural dan Fungsional sesuai dengan kompetensi									
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Pendidikan PT ke atas : jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah x 100 %	%	100	100	100	100	100	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tertaksananya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN dibagi target dianggarkan dikali 100	dokumen			3,596	3,341	3,823	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kinerja pada akhir periode sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022 target	Tahun 2023 target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN		Dokumen			2	2	300	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK		Dokumen			458	193	300	
		Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian		Dokumen			100	110	210	
		Fasilitasi lembaga profesi ASN	Terfasilitasinya lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi		Lembaga			1	1	2	
		Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Terlaksananya perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN		Dokumen			3,000	3,000	3,000	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian		Dokumen			30	30	1	
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian		Dokumen			5	5	10	
				Rasio pegawai fungsional	Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan): seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100 %	%	6.66	7.04	7.5	7.8	7.8	
		Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya mutasi dan promosi ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN dibagi target dikali 100	Dokumen			670	675	1,345	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode 5 tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022 target	Tahun 2023 target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya mutasi ASN yang meliputi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah		Dokumen			20	25	45	
		Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Terlaksananya pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN		Dokumen			600	600	1.200	
		Pengelolaan promosi ASN	Terlaksananya pengelolaan pengembangan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN		Dokumen			50	50	100	
				Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100 %	%	100	100	100	100	100	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi target	Orang			135	160	295	
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya kapasitas ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya		Orang			100	125	225	
		Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Terlaksananya pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan		Orang			5	5	10	
		Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Meningkatnya karir ASN jabatan Fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir		Orang			30	30	60	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022 target	Tahun 2023 target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tertindakannya penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur dibagi target	Laporan			3,205	3,155	3,360	
		Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Tertindakannya pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur		Dokumen			3,000	3,000	3,000	
		Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Tertindakannya pemberian penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan		orang			200	150	350	
		Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Tertindakannya penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN		Laporan			5	5	10	
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia										
				Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	jumlah ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi yang duduk disatu jabatan : jumlah ASN yang menduduki jabatan x 100 %		60.54	65.41	78.00	79.00	79.00	
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Tertindakannya pengembangan kompetensi teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi target	Orang			50	50	100	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022 target	Tahun 2023 target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tertaksarannya Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi		Orang			50	50	100	
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tertaksarannya sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah laporan hasil pelaksanaan	Laporan			1	1	2	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan		Laporan			1	1	2	



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang

Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18)), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18);

19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat P-RPJMD adalah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENJA adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif .

Pasal 3

Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 bertujuan untuk:

- a. menjabarkan P-RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat;
- b. menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- c. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja;
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil pembangunan; dan
- e. tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
- d. Tujuan dan Sasaran

- e. Strategi dan arah kebijakan
- f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan
- g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 5

Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang terdiri dari:

- 1. Sekretariat Daerah;
- 2. Sekretariat DPRD ;
- 3. Inspektorat Daerah;
- 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Dinas Kesehatan;
- 6. Dinas Sosial;
- 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 10. Dinas Pangan dan Pertanian;
- 11. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 12. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan ;
- 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 14. Dinas Lingkungan Hidup;
- 15. Dinas Pariwisata;
- 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 17. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 18. Dinas Perhubungan;
- 19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 21. Badan Keuangan Daerah;
- 22. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- 23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 27. Kecamatan Bukit Intan;

- 28. Kecamatan Gerunggang;
- 29. Kecamatan Gabek;
- 30. Kecamatan Rangkui;
- 31. Kecamatan Pangkalbalam;
- 32. Kecamatan Girimaya ; dan
- 33. Kecamatan Taman Sari.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur tentang RENSTRA Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Januari 2023
WALIKOTA PANGKALPINANG,



Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Januari 2023

PIL. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,



BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 159